

PERAN NEGARA DAN AGAMA DALAM MEMERANGI TERORISME

Zuly Qodir

Abstract:

Terror movements are motivated by psychological, economic, cultural, politics and religious problems. This is a complex problem. But, it becomes more sensitive when religious motivation is involved in it. Nevertheless, terrorism is a human problem that urges all people and the institutions of the state and religions to discover solutions. As in Indonesia, all people are both citizens and members of religions, it is important to realize and get a concrete way against terrorism. What then is the role of religions and the state to overcome the problem of terrorism? How do religions and the state actualize their role against terrorism? Overcoming the problem of terrorism is the first step for developing a peaceful social life. The following step is to promote humanity. However, the state and religions have the same responsibility in educating all people to live universal values such as fraternity, peace, justice, and reciprocal respect and help as way of life.

Kata kunci:

Terorisme, agama, Negara, rasa aman, kesejahteraan, perdamaian.

1. Pendahuluan

Dasa warsa terakhir negeri ini banyak disibukkan oleh persoalan terorisme. Sebenarnya fenomena terorisme tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Asia Tenggara dan berbagai Negara di belahan dunia. Penghancuran gedung WCC di Amerika yang terjadi sepuluh tahun yang lalu menjadi momok bagi dunia bahwa terorisme telah menembus negara yang selama ini menyebut diri atau dikenal sebagai negara adidaya.

Bagi bangsa Indonesia, terorisme tidak hanya menjadi persoalan yang mengancam keamanan negara melainkan juga menyangkut harga diri dan citra Indonesia di mata dunia. Sebagaimana diketahui, Indonesia disinyalir menjadi salah satu basis terorisme di Asia Tenggara dan tempat persembunyian teroris dari berbagai negara lain. Mengingat Indonesia merupakan sebagai bangsa teroris membuat gerah dan tidak nyaman dengan berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim dengan basis muslim moderat, stigma sebagai bangsa teroris tentu membuat gerah dan tidak nyaman. Dalam konteks Indonesia, stigma tersebut juga mencoreng

citra umat muslim Indonesia. Penangkapan banyak aktivits terorisme di Indonesia, sekalipun mereka berkebangsaan Malaysia, pertama-tama nama bangsa dan rakyat Indonesia ikut tercoreng di dalam kancah percaturan internasional.

Orang yang berpikiran jernih merasa prihatin dan selalu terusik oleh aksi-aksi terror. Orang-orang atau kelompok seperti apakah mereka yang dengan sadar memilih menjadi teroris? Siapakah target atau sasaran terorisme? Daerah dan konteks masyarakat seperti apa yang mereka pilih untuk melakukan misi mereka? Mengapa orang bersedia melakukan aksi-aksi teror dan mau menjadikan dirinya dicap sebagai teroris? Apa sebenarnya alasan-alasan pembenaran yang mendorong aksi atau tindakan para teroris? Untuk kepentingan apa mereka melakukan tindakan terror tersebut? Masih banyak pertanyaan lain yang ditambahkan terkait dengan terorisme. Rentetan pertanyaan itu menggambarkan bahwa terorisme merupakan kenyataan yang bertentangan dengan akal sehat dan sulit dipahami. Aksi-aksi teroris jelas sekali secara nalar dan akal sehat merugikan banyak pihak dan membuat masyarakat merasa tidak aman alias terganggu.

Penulis tergerak untuk mencari jawaban atas beberapa pertanyaan di atas dengan harapan agar para pembaca terbantu untuk lebih memahami realitas terorisme. Pemahaman yang lebih baik diharapkan membantu untuk menghadapi dan menanggulangi terorisme dengan langkah-langkah yang tepat dan efektif. Secara khusus penulis mencoba melihat bagaimana negara dan agama-agama harus menjalankan peran mereka dalam menanggulangi terorisme.

2. Memahami Fenomena Terorisme

Pemahaman kita terhadap aksi-aksi teror di Indonesia perlu ditempatkan dalam konteks fenomena gerakan terorisme secara luas. Sejarah telah mencatat bahwa ada beberapa kelompok agama (Islam, Kristen, Hindu, Yahudi) melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap pihak lain. Aksi-aksi kekerasan itu dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran atau alasan pembenaran tertentu yang mereka klaim sebagai ajaran agama.

Ada pula gerakan terorisme yang tidak secara langsung terkait dengan keyakinan terhadap ajaran agama tertentu. Berbagai tindakan dan aksi teror juga bisa terjadi karena didorong oleh motivasi politik, ekonomi, dan budaya. Situasi yang tidak ideal, seperti adanya perlakuan tidak adil, diskriminasi, dan peminggiran dalam bidang politik serta budaya sering juga mendorong berkembangnya aksi-aksi teror. Dengan demikian, entah didorong oleh keyakinan terhadap dalil agama tertentu atau motivasi-motivasi lainnya, gerakan terorisme bertujuan untuk membela suatu nilai tertentu, entah nilai agama, keadilan, atau budaya.

Sejarah telah menunjukkan bahwa kekerasan dan terorisme tidak hanya terkait dengan agama Islam. Aksi-aksi teror pernah terjadi pula dalam masyarakat yang

mayoritas Kristen, Hindu atau beragama lain. Dalam konteks Indonesia, aksi-aksi teror atau gerakan terorisme yang dikaitkan dengan agama Islam menghebohkan dunia karena mayoritas penduduk Indonesia, yakni kira-kira 87 %, beragama Islam. Namun perlu dipahami bahwa penduduk Indonesia, termasuk yang beragama Islam, mempunyai latar belakang yang sangat heterogen dalam hal suku, etnis, bahasa, kepentingan politik dan budaya. Ditambah lagi, adanya kesenjangan ekonomi antara daerah yang satu dengan daerah lain dan persoalan ketidakadilan serta kemiskinan yang terjadi di wilayah Indonesia yang sangat luas ini juga memberi warna terhadap tumbuhnya aksi-aksi teror di Indonesia. Dengan demikian, persoalan terorisme di Indonesia sangat rumit karena tidak hanya terkait dengan agama melainkan juga dengan persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya, demografi dan geografi.

Berbagai peristiwa yang diberi nama atau cap sebagai peristiwa teror di Indonesia sesungguhnya mempunyai motif dan bentuk yang sangat beragam. Selain aksi teror yang diarahkan untuk merusak tempat-tempat ibadah, ada beberapa peristiwa teror yang secara jelas tidak semata-mata bermotif agama. Peristiwa bom buku yang diarahkan kepada para aktivis sosial dan politik merupakan contoh jelas tentang aksi teror yang tidak bermotifkan agama. Di tempat dan waktu berbeda, peristiwa teror menimpa tempat-tempat usaha atau bisnis. Meskipun dikaitkan dengan motif agama, bom Bali merupakan contoh nyata tentang aksi teror yang ditujukan untuk merusak tempat bisnis.

Berbagai aksi teror dengan model dan motif yang sangat beragam menegaskan betapa tidak mudah membuat suatu definisi baku mengenai terorisme. Hal yang kiranya paling mungkin adalah membuat deskripsi umum untuk membantu memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan terorisme. Secara umum terorisme dimengerti sebagai sikap dan tindakan kekerasan yang mengancam ketenangan masyarakat.

Ada beberapa sikap dan tindakan yang bisa digolongkan sebagai gerakan atau aksi terorisme. *Pertama*, terorisme adalah sikap dan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan legalitas (hukum) dan bersifat kriminal. Teror yang dikategorikan sebagai sikap dan tindakan melawan hukum mudah cara mengukur dan menindaknya. Sikap dan tindakan melawan hukum merupakan terorisme yang bersifat politis. Di sebuah negara, hukum berfungsi melindungi dan mempertahankan harga diri (wibawa) politik pemerintahan negara tersebut. Mengingat otoritas hukum Negara melampoi ideologi kelompok, golongan, suku, dan agama, penegak hukum berhak menindak para pelaku teror. Penegak hukum mempunyai kewajiban untuk membela wibawa pemerintah yang sah. Dengan demikian, para penegak hukum berkewajiban menindak tegas para pelaku teror terhadap pemerintah yang sah yang sering disebut sebagai upaya kudeta .

Kedua, terorisme sering berhubungan dengan perjuangan dan perlawanan terhadap penguasa politik atau rezim militer tertentu yang menindas. Gerakan

terorisme dalam pengertian kedua ini terjadi karena para pelaku teror terhadap penguasa yang tidak hanya mengabaikan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat melainkan juga tindakan penumpukan kapital atau penguasaan kekayaan untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya. Para pelaku teror melakukan aksi-aksi teror untuk melawan para penguasa atau rezim yang menindas dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Aksi-aksi teror yang digerakkan oleh motivasi sosial-politik seperti ini terjadi di berbagai Negara, termasuk di Amerika.¹

Ketiga, tindakan teror berupa ancaman fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Tindakan teror jenis ini cenderung mempunyai efek publik secara luas karena dipublikasikan oleh berbagai media massa secara berulang-ulang. Aksi teror dan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap penduduk Palestina berdampak sangat luas karena pemberitaan dari media yang demikian gencar. Demikian pula dengan aksi teror yang terjadi di Afganistan yang dilakukan baik oleh kelompok Bin Laden maupun tentara Amerika Serikat.²

Keempat, aksi terorisme juga berkaitan dengan upaya mempertahankan ideologi tertentu. Metode yang dipilih untuk mempertahankan ideologi tersebut adalah menebarkan ancaman dan aksi kekerasan yang menimbulkan rasa takut terhadap kelompok-kelompok lain yang menjadi pesaing politik. Seorang analis dunia Islam dan terorisme, Mahmood Hamdani, menyampaikan catatan kritis atas aksi teror yang terjadi pada saat perang dingin. Siapa yang harus bertanggung jawab atas aksi-aksi teror yang terjadi pasca Perang Dingin dan Perang Indocina? Dalam konteks ini Mahmood Hamdani melihat adanya aksi teror atau gerakan terorisme yang berskala internasional.

Empat penjelasan di atas kiranya membantu pembaca untuk memahami kompleksitas realitas terorisme. Dengan demikian, kita tidak mudah untuk membuat simpulan-simpulan yang gegabah atas gerakan terorisme yang marak di tanah air dan Asia Tenggara. Selain itu, kita bisa mempunyai gambaran betapa lebih kompleks persoalan terorisme Indonesia dan internasional yang menggunakan tameng agama.

3. Aneka Kajian terhadap Terorisme

Pemahaman kita tentang terorisme diperkaya dengan kajian falsafati. Kajian falsafati berusaha mencari dasar pemikiran paling radikal yang melandasi sebuah tindakan atau perilaku teror, yaitu tindakan dan perilaku yang mengancam dan menakut-nakuti pihak lain. Dalam refleksi falsafati ditegaskan bahwa suatu tindakan selalu memiliki alasan atau argumen radikal yang melatarbelakanginya. Alasan atau argument radikal itu meyakinkan seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dengan kata lain, gerakan terorisme pasti mempunyai landasan pemikiran atau argumen yang melatarbelakanginya sehingga orang merasa yakin untuk melakukannya.

Terorisme juga berhubungan dengan persoalan psikologis. Psikologi behavioristik memberikan penjelasan bahwa perilaku seseorang atau kelompok dilakukan dengan tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Untuk mencapai tujuan itu, ada cara-cara yang dipilih oleh pelaku. Para teroris menggunakan cara-cara kekerasan yang mengancam pihak lain. Selain memiliki tujuan, sebuah tindakan memiliki dampak. Jika tindakan sudah dilakukan maka penilaiannya adalah pada dampak yang ditimbulkan pada masyarakat itu sendiri selain pada diri pribadi yang melakukannya. Kasus bom bunuh diri dapat dilihat dalam perspektif psikologi behaviorisme sebagai aksi teror yang berdampak individual sekaligus sosial.

Terorisme juga bisa ditelaah melalui kajian politik. Gerakan terorisme merupakan sebuah perlawanan terhadap rezim yang menindas dan meminggirkan negara, organisasi, dan kelompok lain. Aksi teror terjadi karena adanya akumulasi kejengkelan dan kebencian terhadap aktor-aktor politik tertentu yang bertindak tidak adil dan melanggar sistem politik yang tiran. Maraknya aksi teror bisa terjadi karena protes dalam bentuk demonstrasi dan cara-cara tanpa kekerasan tidak mendapatkan respon yang memadai. Terorisme merupakan bentuk perlawanan terhadap penindasan (kekerasan berlandung pada kekuasaan) yang dilakukan oleh penguasa politik atau rezim tertentu. Pandangan politik menempatkan terorisme dalam perspektif pemberontakan dengan cara-cara kekerasan, bukan sekedar *civil disobedience*.

Dari perspektif ekonomi, terorisme muncul sebagai perlawanan terhadap pelaku bisnis yang sering mendapatkan dukungan dari rezim penguasa politik atas sistem ekonomi yang tidak adil dan memelaratkan rakyat. Perkembangan ekonomi kapitalis yang didukung oleh perkawinan antara pemilik modal dan penguasa politik telah mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin. Globalisasi ekonomi ternyata membawa dampak bagi ketidakadilan ekonomi secara global dan regional. Karena kedekatan dengan penguasa politik dan modal yang mereka miliki, para pemilik modal mempunyai akses untuk mengembangkan modal mereka dan mendapatkan kekuasaan politik. Banyak pengusaha dan pebisnis (pemilik modal) yang akhirnya menjadi pengurus dan anggota partai tertentu. Pada saat berkampanye, mereka berjanji untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi, pemerataan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Ketika mendapatkan kesempatan untuk memegang kekuasaan politik, banyak di antara mereka lupa terhadap janji-janji selama kampanye. Kepentingan partai dan pribadi mengalahkan kepentingan umum. Persoalan ini mengakibatkan kemarahan di kalangan masyarakat yang tersingkir secara ekonomi.³ Himpitan kebutuhan ekonomi dan kemarahan terhadap para pemimpin bisa menyuburkan gerakan terorisme. Perusakan terhadap pusat-pusat bisnis dengan cara-cara kekerasan merupakan salah satu bentuk nyata terorisme yang diakibatkan oleh frustrasi massa karena himpitan persoalan ekonomi.

Dari perspektif agama, sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang menganut agama tertentu mendasarkan diri pada perintah suci agama tersebut. Gerakan terorisme sering dikait-kaitkan dengan pemahaman dan penafsiran terhadap perintah jihad. Banyak pandangan yang dikemukakan oleh para ahli agama dan tafsir agama tentang adanya ayat-ayat dalam kitab suci dari agama tertentu yang dianggap mendukung terjadinya aksi-aksi kekerasan (terorisme). Pemahaman dan penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu yang mendorong aksi-aksi teror bisa terjadi dalam agama Islam, Hindu, Yahudi maupun Kristen. Dilandasi oleh pemahaman dan penafsiran terhadap teks-teks suci, orang atau kelompok kaum beragama melakukan melakukan tindakan-tindakan publik, termasuk tindakan yang kadang bertentangan dengan misi kemanusiaan.

Teks-teks suci keagamaan yang mempunyai kemungkinan ditafsirkan secara berbeda atau kemungkinan multi interpretasi bisa membawa akibat pada gerakan dan aksi-aksi terorisme berbasis agama. Bahkan aksi teror bisa jadi tidak hanya ditujukan kepada orang yang beragama lain atau tidak beragama melainkan juga kepada pemeluk agama yang sama namun berbeda penafsiran terhadap teks-teks tersebut. Adanya interpretasi yang berbeda bisa mengakibatkan perbedaan pemahaman dan penilaian terhadap sebuah tindakan. Aksi teror berbasis pemahaman terhadap teks suci tertentu, di satu sisi, bisa dinilai sebagai tindakan suci kepahlawanan dan di sisi lain dilihat sebagai perampas hak Tuhan sebagai penguasa hidup dan mati manusia. Inilah resiko dari agama yang mendasarkan diri pada teks-teks suci.

Paparan di atas membantu kita untuk memahami dan memetakan berbagai gerakan terorisme yang ada di Indonesia dan negara-negara lain. Terorisme atau aksi-aksi kekerasan tidak hanya terkait dengan praktik keagamaan yang didasarkan para penafsiran dan pemahaman dogma tertentu melainkan juga berhubungan dengan adanya persoalan kejiwaan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dalam analisis sosiologis Gregory Baum, dalam berbagai tradisi keagamaan, ada keyakinan dan kerinduan terhadap hadirnya mesiah, Sang Penyelamat, yang akan datang pada zaman akhir. Kerinduan itu menguat di dalam kehidupan orang-orang yang yang tertindas, terasing dan berada dalam himpitan pengalaman negatif.⁴ Orang-orang yang tertindas, terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan merindukan adanya figur mesiah atau penyelamat yang meneguhkan mereka untuk perjuangan mereka untuk menegakkan keadilan. Analisis Marxis yang menekankan perjuangan keadilan demi kesejahteraan ekonomi menjadi landasan sosiologis bagi perkembangan teologi pembebasan Kristen. Pemikiran Marx tentang keadilan dan kesejahteraan hidup memberi bentuk nyata terhadap keselamatan sebagaimana diwartakan oleh agama-agama. Gerakan sosial Marxis menghalalkan cara-cara revolutif untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Dalam perspektif sosiologis keagamaan, gerakan terorisme merupakan bentuk ekstrem aplikasi cara-cara revolutif untuk mewujudkan tercapainya keselamatan, yaitu masyarakat yang sejahtera dan adil yang dimotivasi oleh dalil-dalil keagamaan.

Bryan Wilson menyebutkan bahwa munculnya komunitas-komunitas agama yang kadang “galak” terhadap kelompok-kelompok lain merupakan respon atas masalah-masalah sosial-ekonomi-politik yang dipengaruhi oleh “mimpi” hadirnya Sang penyelamat.⁵ Ketika situasi sosial tidak menentu dan harapan terhadap perubahan semakin menipis, banyak orang akan dengan mudah terpicat terhadap seseorang yang dengan berani mengemukakan janji-janji pada publik dan memberikan ajaran-ajaran bermotif agama yang diyakini akan memberikan jalan baru. Apabila tokoh yang tampil itu berhaluan ekstrem dan mampu menggerakkan massa untuk bertindak galak terhadap kelompok lain, di situlah gerakan terorisme berkembang dengan subur.

Berkembangnya terorisme juga mengindikasikan gagalnya dakwah agama yang bersifat transformatif. Alih-alih memberi inspirasi bagi perkembangan masyarakat yang damai, dakwah (misi) agama yang bersifat agitatif-tanpa konteks menjadi pemicu gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat ekstrimis. Dakwah agama merupakan hal yang dianggap sangat penting dalam hubungannya dengan karakteristik masyarakat beragama. Jika dakwah yang dikembangkan merupakan dakwah yang bersifat agitatif akan sangat mungkin menghasilkan masyarakat yang penuh dengan kebencian, meskipun secara luaran tampak adanya masyarakat yang militan dalam beragama. Sikap simpatik dan penghargaan terhadap perbedaan serta keberagaman akan terjadi jika misi atau dakwah yang disampaikan adalah dakwah yang lebih bersifat transformatif dan pemberdayaan masyarakat.

Yang tidak bisa diabaikan dalam konteks perkembangan agama di tengah situasi politik adalah perebutan legitimasi dan otoritas untuk melakukan penafsiran, melakukan kontrol terhadap komunitas. Perebutan legitimasi untuk mempertahankan otoritas dalam hal penafsiran dan keputusan inilah yang oleh Meredith McGuice disebut sebagai kompetisi mempertahankan sumber-sumber otoritas, termasuk legitimasi keagamaan, sekalipun tidak jarang menjurus pada status quo keagamaan.⁶

Dalam perkembangan sejarah, tampak jelas betapa banyak negara dan penguasa politik menjadikan agama sebagai alat kontrol dan sarana untuk mempertahankan status quo. Ketika agama dikooptasi dan dikontrol oleh Negara dan kekuatan politik tertentu, agama akan menjadi “agama rezim” tertentu. Sebaliknya, ketika institusi agama mengontrol negara, negara agama tidak hanya akan menjadi wacana melainkan akan mendekati kenyataan. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, kontrol sebuah institusi agama terhadap Negara akan menimbulkan diskriminasi dan peminggiran terhadap kelompok-kelompok yang tidak sehaluan dengan institusi pengontrol itu. Ketika kontrol itu menggunakan kekerasan, tindakan teror terhadap kelompok lain akan dengan mudah terjadi.

Berkembangnya terorisme berhubungan erat dengan lemahnya sikap kritis masyarakat. Lemahnya sikap kritis dalam masyarakat semakin diperarah oleh model pendidikan agama yang lebih bercorak formalisme-indoktrinatif dan kurang

memberikan ruang refleksi-kritis pada peserta didik. Meskipun rumah-rumah ibadat semakin bertambah dan dipenuhi banyak pendoa, namun dangkalnya pemahaman keagamaan mudah bertindak irrasional, menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan persoalan hidup bersama. Contoh paling jelas adalah pemahaman yang dangkal terhadap ajaran jihad. Ketika jihad hanya dipahami sebagai sikap dan tindakan untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sehaluan dan berbeda dalam keyakinan beragama. Pendidikan agama ini tentu akan terkait dengan pemahaman keagamaan, fungsi transformatif agama menjadi lemah. Agama-agama justru bisu dan kurang peka terhadap persoalan-persoalan ketidakadilan dan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran di tengah masyarakat. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan taat beragama menjadi bukti lemahnya fungsi profetis (kenabian) dan transformatif (pembaruan) agama-agama.

Ketika agama gagal menghadirkan fungsi edukatif, profetis dan transformatif, dengan mudah agama akan menjadi alat legitimasi gerakan terorisme. Teks-teks suci yang semestinya membangun sikap dan tindakan moral yang humanis dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal bisa berhenti dalam wacana ritual dan diinterpretasikan secara sempit yang mendorong tumbuhnya gerakan terorisme. Dalam hal ini, agama bukan merupakan penyebab terorisme melainkan dipakai sebagai pembenar atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap orang lain yang tidak sehaluan.

4. Dampak Terorisme

Jika kita perhatian pelbagai peristiwa terorisme yang menggunakan kekerasan dan pemboman maka ada hal-hal yang bisa kita masukan sebagai bagian dari dampak terjadinya terorisme. Beberapa dampak tersebut antara lain:

Pertama, gerakan terorisme telah mengakibatkan kematian jiwa manusia. Kematian manusia akibat kekerasan (terorisme), berapapun jumlahnya, entah sedikit atau banyak, menciderai atau melukai nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Tindakan ini jelas bertentangan dengan hak hidup manusia. Manusia tidak mempunyai hak untuk menghentikan hidup sesamanya. Lebih mengerikan lagi, korban dari tindakan teror adalah orang yang tidak bersalah dan tidak ada sangkut pautnya dengan si pelaku. Terbunuhnya pada pekerja, para pengunjung dan orang-orang yang sedang lewat saat terjadinya bom Bali menggambarkan betapa kematian itu sangat melukai nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dimotivasi oleh ajaran agama (suci) kematian para pelaku bom bunuh diri melukai nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua, terorisme berdampak bagi kerugian material. Kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan pemboman tempat-tempat umum, ibadat maupun perbelanjaan telah mengakibatkan kerugian besar secara material baik individu-individu tertentu maupun pemerintah. Kerugian material merupakan hal yang

nyaris tidak pernah terelakkan tatkala aksi-aksi terorisme terjadi di sebuah negara atau sebuah daerah. Pemboman Twin Tower di New York pada tanggal 11 September 2001 menggemparkan dunia karena berdampak sangat hebat. Selain ribuan jiwa terbunuh, korban material luar biasa. Pusat kehidupan ekonomi lumpuh total. Dalam skala yang lebih kecil, korban jiwa dan material juga amat dirasakan akibat pemboman JW Marriot dan Ritz Charton Hotel Jakarta oleh kelompok Noordin M Top.

Ketiga, aksi-aksi terorisme juga berdampak psikologis. Rasa takut, cemas dan tidak aman akibat ancaman para pelaku terorisme bisa dengan cepat menyebar dan menjangkiti kehidupan masyarakat karena tayangan media. Terorisme yang terjadi seringkali memunculkan apa yang dinamakan politik teror. Yang dimaksud dengan politik terror adalah sebuah teror yang dilakukan oleh kelompok tertentu atas masyarakat karena diliput oleh media. Pemberitaan besar dari media terhadap aksi-aksi terorisme menghadirkan politik terror dan mengakibatkan perasaan takut dan cemas dalam skala global.

Dampak psikologis dari gerakan terorisme yang diliput media secara besar-besaran adalah multiplikasi (penggandaan) “imajinasi teror”. Dalam kepentingan kekuasaan sosioal-politik, imajinasi teror bisa menjadi bagian bentukan (konstruksi) politik teror.

Keempat, gerakan terorisme mempunyai dampak hukum (yuridis). Tindakan teror diperkarakan secara hukum (baik hukum internasional, HAM, dan pidana) atas perilaku yang dilakukan. Dalam banyak diskusi tentang aksi-aksi terorisme di Indonesia, banyak pihak berhadapan agar para pelaku aksi teroris diajukan pada jalur hukum. Dari pengadilan bisa dilihat secara jelas apakah tindakan itu merupakan tindakan kriminal murni, tindakan bermotif agama, dan politik yang melanggar hak asasi manusia.

Setelah mencermati pelbagai penyebab dan dampak terorisme, selanjutnya perlu mencari langkah-langkah nyata untuk menanggulangi gerakan terorisme. Namun hal yang tidak kalah penting adalah memahami subyek yang paling bertanggungjawab terhadap upaya penanggulangan terorisme. Pemerintah dan polisi sering menegaskan bahwa seluruh warga negara bertanggungjawab dalam upaya memerangi terorisme. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, penulis melihat bahwa negara dan agama mempunyai tanggungjawab besar untuk menanggulangi terorisme. Sesuai dengan tugas utama negara adalah untuk menjamin keamanan dan perdamaian kehidupan seluruh warganya, negara berkewajiban menanggulangi gerakan terorisme yang jelas-jelas mengancam keamanan dan kedamaian masyarakat.

Selanjutnya, tidak dapat disangkal bahwa banyak terorisme di Indonesia sering menggunakan dalil-dalil agama sebagai alat legitimasi. Dari situ tampak bahwa terorisme merupakan tantangan bagi agama-agama untuk merefleksikan dirinya apakah sudah memberikan pendidikan agama yang tepat. Mengingat

seluruh warga negara Indonesia diwajibkan beragama, semua agama yang ada di Indonesia perlu bekerjasama untuk menanamkan nilai-nilai agama sehingga para pemeluk agama memiliki karakter kritis terhadap praktik-praktik keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, agama bertanggungjawab untuk mendidik para pemeluknya dalam mengembangkan tanggungjawab sosial dan membangun masyarakat yang adil dan damai. Para pemuka agama entah kiai, ustadz, pastor, pendeta dan tokoh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, PGI dan Walubi bertanggungjawab untuk mendidik para pemeluk agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Karena semua warga Negara Indonesia adalah pemeluk agama tertentu, peran negara dan agama sangat penting dalam memerangi terorisme dan mengembangkan kehidupan bersama yang adil dan damai. Bagaimana agama dan negara menjalankan peran mereka untuk menanggulangi terorisme?

5. Peran Negara dan Agama

Dalam pasal 29 UUD 1945, ditegaskan bahwa semua warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memeluk suatu agama. Dengan kata lain, memeluk suatu agama merupakan hak setiap warga negara dan dijamin oleh undang-undang. Dalam hal ini, negara harus melindungi warganya apapun agama yang dianutnya. Selain, hak untuk mendapatkan perlindungan untuk memeluk dan menjalankan agamanya.

Warga negara juga harus mendapatkan perlindungan dari pelbagai macam bentuk ancaman yang datang dari warga negara lain atau sesama warga negara. Negara wajib melindungi hak-hak dasar warganya dalam kondisi apa pun untuk hidup secara aman dan damai. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk menghalau segala bentuk ancaman yang mengganggu kehidupan setiap warganya.

Secara konkret, negara berkewajiban memberikan dan menjamin rasa aman bagi semua warga. Segala bentuk tindakan kekerasan, terorisme, ancaman dan perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain merupakan musuh negara.

Keamanan juga akan menjadi penting dalam kaitannya dengan kewajiban negara dalam memberikan kesejahteraan atas warga negara karena warga negara telah membayar pajak. Negara dilarang mengabaikan warga negara untuk urusan kesejahteraan. Sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi Hak Hak Asasi Manusia, negara seharusnya memberikan jaminan perumahan, pendidikan, pekerjaan dan dan kesejahteraan hari tua karena warga negara telah membayar pajak. Tidak terpenuhinya kesejahteraan warga negara menimbulkan terjadinya "pemberontakan" atau ketegangan-ketegangan yang akan mengganggu ketenangan masyarakat. Negara berkewajiban menjamin kesejahteraan dan keamanan warganya.

Kewajiban negara yang sangat penting lainnya adalah melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan mengungkapkan keyakinannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Negara tidak boleh bersekutu dengan kelompok masyarakat yang ada di sebuah negara kemudian melakukan aksi-aksi yang hendak meniadakan atau hendak mengusir salah satu penganut agama yang dianggap sesat. Negara tidak dibolehkan sama sekali menjadi pemicu utama dengan mengeluarkan fatwa-fatwa tentang keagamaan masyarakat yang dianggap sesat, sehingga warga negara lainnya menghujat bahkan merusak tempat-tempat ibadah warga negara yang berbeda dianggap tidak sehaluan dengan *mainstream* tertentu. Kasus tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah, Islam Wetu Telu, Islam Adat, agama adat di beberapa daerah nusantara adalah bukti lemahnya perlindungan negara atas kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan aksi-aksi terorisme, tugas utama negara adalah menciptakan rasa aman, nyaman bagi warganya dan tidak dibenarkan melakukan kekerasan apapun bentuknya. Negara tidak bisa menerapkan tindakan semena-mena terhadap kelompok agama tertentu yang dianggap sesat secara sepihak. Agama juga tidak berhak untuk menghentikan aktivitas-aktivitas agama tertentu atau menyuruh lembaga-lembaga kenegaraan untuk melakukan bumi hangus secara semena-mena terhadap agama tertentu sejauh aktivitas agama tersebut tidak menimbulkan terror fisik maupun psikologis kepada warga masyarakat lainnya.

Ada beberapa hal penting yang harus dikerjakan oleh negara dalam kaitannya dengan gerakan terorisme. *Pertama*, negara harus menegakan hukum yang adil dalam bagi semua warganya. Aparat penegak hukum, termasuk aparat keamanan harus berani bertindak tegas atas mereka yang melanggar hukum resmi atau hukum positif. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan politik tertentu, kekuasaan dan keuangan. Oleh karena itu, siapa saja yang melanggar hukum sudah seharusnya mendapatkan hukuman setimpal tanpa dilihat dekat dengan siapa dan memiliki kekuasaan apa. Manipulasi peradilan dan politisasi hukum bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan keadilan dan hidup aman.

Penegak hukum dan aparat keamanan tidak boleh berlindung di balik delik “pelanggaran HAM” tatkala akan bertindak tegas pelaku-pelaku kekerasan sektarian agama, sebab pelaku kekerasan internal agama itulah yang sesungguhnya lebih melanggar HAM dalam hal kebebasan dalam beragama. Aparat keamanan harus memiliki bekal yang memadai tentang apakah HAM dan apakah pekerjaan yang melanggar HAM. Jika ternyata banyak aparat penegak hukum belum memiliki penguasaan yang memadai tentang apa artinya HAM, mereka perlu mendapatkan pendidikan HAM secara intensif dan benar-benar efektif terlebih dahulu.

Tugas pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan secara persuasif kepada masyarakat mengenai pelbagai macam peraturan pemerintah

atau UU, terutama yang terkait tata kelola agama dalam masyarakat. Ada banyak peraturan dan undang-undang yang tidak diketahui oleh masyarakat luas. Maka, melalui kementerian informasi, departemen dalam negeri dan departemen Hukum dan HAM pemerintah bertanggungjawab untuk mensosialisasi berbagai peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan penataan hidup bersama di tengah masyarakat. Dengan demikian masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu peraturan dan undang-undang.

Negara semestinya tidak mencampuri urusan-urusan keimanan seseorang dan memberikan *labeling* pada salah satu kelompok agama tertentu yang akan berdampak kurang positif pada level masyarakat. *Labeling* sesat, kafir, dosa besar, dan munafik semestinya tidak dilakukan oleh institusi negara dan pemerintah, seperti MUI atau Departemen Agama. Memang ada banyak perdebatan dalam persoalan ini, tetapi saya kira memilih untuk menempatkan negara tidak turut campur dalam masalah-masalah keyakinan, keagamaan dan hal-hal prinsipil dalam hubungan manusia dengan Tuhan merupakan pilihan yang paling masuk akal sebab soal keyakinan merupakan urusan seseorang dengan Sang Pemberi Hidup bukan sesama makhluk hidup. Bagi penulis, sikap ini jelas bagi negara Indonesia sebagai Negara Pancasila dan bukan negara agama.

Negara sebaiknya mengkhhususkan pada masalah-masalah pencegahan kekerasan berbasis agama, pelanggaran dan kelompok-kelompok agama yang hendak melakukan perusakan serta mengacaukan ketertiban yang meresahkan masyarakat. Dalam posisi ini negara, melalui aparat keamanan, menempatkan diri sebagai pelindung dan penjaga keamanan serta ketertiban. Negara semestinya tidak menempatkan diri sebagai “penjaga keimanan” atau pintu sorga dan neraka kaum beragama. Biarlah keimanan masyarakat dijaga oleh dirinya sendiri, bukan oleh negara apalagi “polisi syariah”. Bukankah ketulusan dalam beragama bukan ditentukan oleh adanya “polisi syariah” atau tidak, tetapi oleh sikap diri masing-masing pemeluk agama pada Tuhan?

Dalam konteks masyarakat Indonesia (juga dunia) dalam memerangi terorisme, agama-agama juga perlu merumuskan dan menjalankan perannya secara tepat. Salah satu fungsi penting agama adalah menjaga dan meningkatkan keimanan serta moralitas para pemeluknya. Salah satu keberhasilan melaksanakan fungsi itu adalah perannya untuk membangun kehidupan bersama yang menjunjung tinggi ahlak dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kebenaran, kejujuran, keadilan, saling menghormati serta tolong-menolong, dan perdamaian. Dakwah semestinya menjadi sarana untuk mendorong agar para pemeluk agama menghayati nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dakwah yang benar semestinya berciri transformatif. Dakwah semestinya dijalankan dengan cara-cara yang tidak agitatif, mencederai sesama penganut agama, melukai agama lain, memprovokasi perbuatan-perbuatan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Sudah saatnya mendakwahkan agama dengan cara yang empatik atas berbagai varian agama dan kelompok yang ada

dalam masyarakat. Agama tidak diceramahkan untuk menghakimi dan mengadili serta menjelekkan pihak lain, apalagi untuk membenci dan memusuhi pihak lain yang berbeda dengan penganut agama tertentu.

Agama dan ormas agama perlu menjalin kerjasama dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan, bukan bekerjasama dalam hal-hal yang mengarah pada persoalan-persoalan keimanan, sebab keimanan merupakan hak asasi dari masing-masing penganut agama. Dalam bentuk lainnya tentu saja ormas agama tidak perlu melakukan agitasi terhadap kelompok agama lain yang secara formal tampak berbeda, sebab dalam kaitan dengan keimanan yang harus dipahami adalah formalisme tentu akan berbeda tetapi substansi biasanya menemukan persamaan. Disinilah umat beragama harus bekerjasama dalam kemanusiaan yang bersifat universal.

Dalam konteks Indonesia, ada banyak persoalan kemanusiaan yang bisa menjadi titik temu dan kerjasama antar pemeluk agama. Kerjasama itu bisa dilaksanakan dalam kerangka membangun wacana publik yang kritis dan mencerdaskan misalnya melalui diskusi-diskusi serta publikasi untuk melawan korupsi dan berbagai ketidakadilan. Kerjasama juga bisa dibangun untuk kepentingan praktis, misalnya untuk membantu orang miskin dan para korban bencana. Kerjasama antara kelompok agama dan ormas keagamaan juga bisa dijalin untuk membantu para penderita AIDS, pecandu obat-obat terlarang dan anak-anak jalanan. Pendidikan akhlak dan pelatihan-pelatihan kerja merupakan lahan lain yang membuka kemungkinan luas untuk bekerjasama. Dengan cara-cara demikian, keberadaan agama-agama sungguh mendidik, mencerdaskan, dan mentransformasi hidup bersama.

Nilai-nilai universal dalam internal agama dan antar agama harus menjadi landasan bersama dalam menata hubungan antara masyarakat sipil dengan negara, sehingga antara peran negara dan peran agama tidak saling bertabrakan satu sama lain. Ketika agama-agama tidak mempunyai hati untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak membuka dialog serta kerjasama yang transformatif, ketegangan, kecurigaan dan kebencian antar agama dan kelompok keagamaan yang berbeda akan berkembang subur. Keberadaan agama dan kelompok keagamaan yang hanya saling menyalahkan dan menghakimi akan menjadi lahan berkembangnya gerakan teror yang meresahkan masyarakat dan merugikan kehidupan bersama. Dengan demikian, tidak hanya citra agama yang ditampilkan secara negatif melainkan juga citra bangsa.

Banyak lembaga pendidikan di Indonesia menggunakan nama agama atau paling tidak berbasis ajaran agama tertentu. Pendidikan di sekolah negeri pun menyediakan pelajaran agama sebagai mata pelajaran wajib. Hal ini merupakan peluang besar untuk menyiapkan para generasi muda untuk membangun akhlak yang baik dan mengenali serta menghayati nilai-nilai universal kemanusiaan. Maka, pendidikan agama semestinya mendekatkan para siswa dengan realitas hidup masyarakat sehingga mereka semakin peka terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang hanya bisa dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama

dalam kerjasama dengan semua anggota masyarakat yang berlatar belakang agama berbeda. Pendidikan agama semestinya memberikan pencerahan dan pembebasan manusia dari jerat kemiskinan, kebencian, kecurigaan, dan kekerasan. Agama diajarkan sebagai sumber nilai universal dan kemanusiaan yang membela kebenaran, keadilan, persaudaraan dan perdamaian. Dengan model pendidikan semacam ini, agama tidak akan semakin jauh dengan umatnya, tetapi semakin mendekatkan umat beragama dengan ajaran-ajaran keagamaan yang selama ini lahir dari konteks sosial dan historis yang terjadi.

Di tengah berbagai persoalan terorisme, pendidikan agama semestinya menjadikan fenomena ini sebagai kesempatan berintrospeksi, menumbuhkan kepedulian sosial, mengobarkan semangat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara-cara yang santun dan damai. Mencermati betapa sulitnya menemukan satu pemahaman tunggal dan penyebab tunggal tentang terorisme, pendidikan agama semestinya menumbuhkan kesadaran sebagai umat beragama dan warga negara tidak terjebak dalam pemahaman yang serba kaku tentang agama dan istilah-istilah yang krusial. Setiap pemeluk agama semestinya semakin rendah hati dan mau belajar bekerjasama dalam memecahkan persoalan-persoalan yang pelik di tengah masyarakat. Sikap saling curiga dan menyalahkan justru akan memecah belah para pemeluk agama dan warga negara yang akan memperburuk citra agama dan negara.

4. Penutup

Terorisme merupakan masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan penanganan yang sangat serius. Tanpa adanya keseriusan dalam memahami, kita tidak mungkin mampu menanganinya. Pemahaman yang sempit akan melahirkan cara-cara dan penanganan yang kurang komprehensif pula. Akibatnya, akar persoalan justru tidak tersentuh. Inilah yang sering menjadi problem bagi negara Indonesia, muslim Indonesia, para penegak hukum dan aparat keamanan yang bertugas menjaga masyarakat dari pelbagai macam ancaman kekerasan dan teror.

Masalah terorisme membutuhkan penanganan secara luas dan serentak dalam jalinan kerjasama yang erat antara negara, agama-agama dan seluruh komponen masyarakat. Masing-masing memiliki peran yang penting dan perlu terus menerus mewujudkan peran itu secara persuasif, edukatif dan transformatif.

Pemerintah perlu menyadari peran dan tanggungjawabnya untuk melindungi semua warga masyarakat dan menciptakan rasa aman dan damai. Penegakan hukum sangat mendesak agar keadilan sungguh dialami oleh semua warga negara. Siapa bersalah semestinya mendapatkan hukuman yang setimpal secara adil. Keadilan hukum perlu disertai dengan kesejahteraan atau pemerataan kesejahteraan ekonomi. Tiadanya kesejahteraan ekonomi bisa mengakibatkan gerakan sosial yang menggunakan cara-cara dan tindakan kekerasan dalam menuntut keadilan.

Mengatasi berbagai persoalan kekerasan tanpa mengembangkan kepedulian dan tanggungjawab sosial antar warga masyarakat hanya akan menghasilkan suasana aman yang semu. Maka, dalam kasus penanganan terhadap masalah terorisme, penegakkan keadilan dari sisi hukum perlu disertai upaya pendidikan masyarakat sipil. Pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan karakter sosial ditempuh melalui pendidikan formal maupun pendidikan dalam keluarga. Dalam kaitan dengan pengemangan karakter, pendidikan agama perlu dikemas secara kontekstual agar sejak usia muda banyak orang peduli terhadap keprihatinan-keprihatinan sosial. Pendidikan agama dan dakwah perlu disampaikan dengan cara-cara yang cerdas dan menghantar para siswa memahami dan menghayati nilai-nilai universal. Pendidikan semestinya membantu para siswa untuk menyadari pentingnya kerjasama dalam memperjuangan nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, perdamaian, persaudaraan dan kerjasama.

Dapat disimpulkan bahwa di tengah ancaman terorisme yang menimbulkan persoalan yang kompleks, perlu ada upaya-upaya konkret. Upaya itu bisa secara langsung dibuat dengan cara menegakkan hukuman yang tegas terhadap para pelaku terorisme. Selanjutnya, upaya untuk menanggulangi terorisme bisa dilakukan secara tidak langsung. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penegakan keadilan dan pelayanan yang kredibel dari pemerintah terhadap semua lapisan masyarakat menjadi sarana yang efektif dan penting. Selian itu, pemerintah juga perlu mengembangkan penyelenggaraan pendidikan yang mencerdaskan dan menumbuhkan tanggungjawab sosial. Institusi agama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan moralitas para warganya melalui dakwah yang mencerdaskan dan mendorong tanggungjawab sosial para pemeluk agama tersebut. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, agama-agama perlu bergandengan tangan untuk mengembangkan dialog yang mendorong kerjasama untuk mengatasi berbagai persoalan hidup bersama.

Zuly Qodir

Dosen Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: email: zuly_qodir@yahoo.com

Endnotes

- ¹ Bdk. Bruce Lavrence, "Politik Internasional Terorisme", 198-199.
- ² Bdk. Edward W Said, Ideologi, "Media dan Lokal Teror", 279.
- ³ Bdk. Joseph Stiglitz, *Making Globalization*, 49.
- ⁴ Bdk. Gregory Baum, *Religion and Alienation: A Theological reading of Sociology*, 227-238
- ⁵ Bdk. Bryan Wilson, *Magic and The Millenium*, 309-314
- ⁶ Bdk. Meredith B Mc Guice, *Religion: The Social Context*, 183-185.

Daftar Pustaka

Lavrence, Bruce,

2007 "Politik Internasional Terorisme", dalam *Agama dan Terorisme*, Francis Fukuyama dkk, UMM Press, Surakarta.

Said, Edward W.,

2007 "Ideologi, Media dan Lokal Teror", dalam *Agama dan Terorisme*, Francis Fukuyama dkk, UMM Press, Surakarta.

Baum, Gregory,

1975 *Religion and Alienation: A Theological reading of Sociology*, 227-238.

McGuice, Meredith B.,

1981 *Religion: The Social Context*, Sage Publication, Singapura.

Wilson, Bryan R.,

1973 *Magic and The Millenium : A Sociological Study of Religious Movements of protest Among Tribal and Third World peoples*, p. 309-314

Stiglitz, Joseph,

1999 *Making Globalization*, Sage Publication, USA.